

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP**

**DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (Studi Kasus: Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Hak
Pakai Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dengan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Susna Deli)**



Disusun Oleh :

DIDIK SUPANTRI

NIM : 2120123026

KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Yulia Mirwati., S.H. CN. M.H

(Pembimbing I)

Dr. Yussy Adelina Mannas., S.H., M.H

(Pembimbing II)

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (Studi Kasus: Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dengan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Susna Deli)

Didik Supantri, 2120123026, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024

ABSTRAK

Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan, manusia tinggal dan berkembang serta melakukan aktivitas sehari-hari diatas tanah dan sebagian besar kehidupannya bergantung pada tanah. Persoalan tanah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Semakin kompleksnya persoalan hidup manusia yang disebabkan oleh tanah saat ini, mengharuskan adanya sebuah aturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara manusia dengan tanah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL dan untuk mengurangi sengketa, dilakukan percepatan PTSL melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran tanah sistematis lengkap terkadang menimbulkan berbagai masalah sertipikat tumpang tindih yang disebabkan adanya keteledoran dalam menentukan batas tanah dan belum adanya kelengkapan peta pertanahan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Sertipikat tumpang tindih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan mengurangi kekuatan sertipikat sebagai alat bukti. Badan Pertanahan memiliki andil yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa tumpang tindih melalui mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa tumpang tindih dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Solok Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum dengan penelitian langsung ke lapangan serta data kepustakaan yang bersumber dari undang-undang, jurnal, dan dokumen resmi. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa timbulnya sertipikat tumpang tindih merupakan keteledoran dari pihak-pihak yang bersengketa mengenai batas dan luas tanah serta kurang telitinya Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat yang disebabkan belum diperbaharuinya peta tanah di Kabupaten Solok Selatan.

Kata Kunci : Mediasi, Pendaftaran Tanah, Tumpang Tindih

COMPLETE SYSTEMATIC RESOLUTION OF OVERLAPPING DISPUTES ON LAND REGISTRATION

IN SOLOK SELATAN (Case Study: Overlapping Dispute of the South Solok Regency Government's Certificate of Use Rights and the Certificate of Ownership Rights in the Name of Susna Deli)

Didik Supantri, 2120123026, *Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024*

ABSTRACT

Land and humans cannot be separated, humans live and develop and carry out daily activities on the land and most of their lives depend on the land. The land issue in Indonesia is a complex problem. The increasingly complex problems in human life caused by land today require the existence of regulations that guarantee legal certainty in the relationship between humans and land. The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is the first land registration activity carried out simultaneously for all land registration objects in the context of registering all plots of land throughout the territory of the Republic of Indonesia. To ensure legal certainty and legal protection for the PTSL program and to reduce disputes, PTSL has been accelerated through Executive Order Number 2 of 2018 on Acceleration of Complete Systematic Land Registration. Complete systematic land registration sometimes causes various problems with overlapping certificates due to negligence in determining land boundaries and the lack of complete land maps in South Solok Regency. Overlapping certificates create legal uncertainty for land rights holders and reduce the strength of certificates as evidence. The Land Office has a very large role in resolving overlapping dispute through mediation as a pathway for resolving overlapping disputes in complete systematic land registration in South Solok Regency. The method used in this research is empirical juridical and descriptive analysis. Collecting legal materials by direct research in the field as well as library research data sourced from laws, journals and official documents. The results and discussion of the research show that the emergence of overlapping certificates is due to negligence on the part of the parties in dispute regarding the boundaries and area of land as well as the Land Office's lack of thoroughness in issuing certificates due to the land map in South Solok Regency not being updated.

Keywords: Land Registration; Mediation; Overlapping

